ANALISA PENGARUH PERTAMBAHAN JUMLAH NPWP TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) KOTA PALEMBANG

Skripsi Oleh :

VIVI OCTAVIA

NIM 01061003059

Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI
INDERALAYA

Tahun 2010

657.460 7
Oct
a
c.1 1009948

ANALISA PENGARUH PERTAMBAHAN JUMLAH NPWP TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) KOTA PALEMBANG

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

Skripsi Oleh :

VIVI OCTAVIA

NIM 01061003059

Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI
INDERALAYA
Tahun 2010

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA	:	VIVI OCTAVIA
NIM	:	01061003059
JURUSAN	:	AKUNTANSI
MATA KULIAH	:	PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI	:	**ANALISA PENGARUH PERTAMBAHAN JUMLAH NPWP TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) KOTA PALEMBANG**

PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI :

TANGGAL PERSETUJUAN		DOSEN PEMBIMBING
Tanggal 11 Mei 2010	Ketua :	Ahmad Subeki, SE., M.M.,Ak NIP. 196508161995121001
Tanggal 11 Mei 2010	Anggota :	Luk Luk Fuadah, SE., M.B.A., Ak NIP. 197405111999032001

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN PANITIA UJIAN KOMPREHENSIF

NAMA	:	VIVI OCTAVIA
NIM	:	01061003059
JURUSAN	:	AKUNTANSI
MATA KULIAH	:	PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI	:	**ANALISA PENGARUH PERTAMBAHAN JUMLAH NPWP TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) KOTA PALEMBANG**

Telah diuji di depan panitia ujian komprehensif pada tanggal 10 Mei 2010 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Inderalaya, 11 Mei 2010

Ketua,	Anggota,	Anggota,
Ahmad Subeki,SE.,M.M.,Ak	Luk Luk Fuadah,SE., M.B.A.,Ak.	Eka Meirawati,SE.,M.Si.,Ak.
NIP. 196508161995121001	NIP. 197405111999032001	NIP. 196905251996032001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Drs.Burhanuddin.M.Acc.,Ak.
NIP. 195808281988101001

Keep your eyes on the stars and your feet on the ground

(Franklin D. Roosevelt)

Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you'll be a success.

(Albert Schweitzer)

Dedicated to:

Our God, Tuhan Yang Maha Esa
My beloved parents,
My whole family,
My brother & my sister,
My true friends, and
My alamamater

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin-Nya jualah penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Penulisan skripsi ini mengambil judul **Analisa Pengaruh Pertambahan Jumlah NPWP terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kota Palembang.** Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Bab IV Pembahasan, dan Bab V Kesimpulan dan Saran.

Data utama yang digunakan adalah data primer perusahaan yang diperoleh dengan cara kuisioner dan dokumentasi sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama tahun 2005-2009 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Timur adanya hubungan yang signifikan antara pertambahan jumlah NPWP dengan jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP). Akan tetapi lain halnya di dua KPP Pratama Palembang Ilir Barat dan KPP Pratama Palembang Seberang Ulu yang menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara pertambahan jumlah NPWP dengan jumlah penerimaan PPh OP. Oleh karena itu, diharapkan KPP dapat menjalankan kebijakan dari pemerintah dengan sebaik-baiknya meningkatkan penerimaan pajak.

Penulis berharap skripsi ini dapat manfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Kota Palembang dan juga sebagai bahan masukan bagi akademisi yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

Penulis,

Vivi Octavia

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisa Pengaruh Pertambahan Jumlah NPWP terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Palembang" sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan dukungan baik moril maupun material dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Prof. Dr. Hj.Badia Perizade, M.B.A., Rektor Universitas Sriwijaya
2. Dr. Syamsurijal, Ak., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
3. Drs.Burhanuddin.M.Acc.,Ak., Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
4. Drs.Burhanuddin.M.Acc.,Ak., Pembimbing Akademik.
5. Ahmad Subeki, SE., M.M.,Ak., Pembimbing I Skripsi
6. Luk Luk Fuadah, SE., M.B.A., Ak., Pembimbing II Skripsi
7. Eka Meirawati,SE.,M.Si.,Ak., Dosen Penguji Ujian Komprehensif
8. Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
9. Pimpinan dan staf karyawan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Timur, Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Barat, dan Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Seberang Ulu.
10. Kedua orang tuaku yang tercinta dan saudara-saudariku yang telah memberikan dukungan moril dan pendanaan.
11. Staf pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
12. Teman-teman seangkatan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas budi baik mereka dan memberi berkah kepada kita semua, Amin.

Penulis,

Vivi Octavia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ii

HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA UJIAN KOMPREHENSIF iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

UCAPAN TERIMA KASIH vi

DAFTAR ISI vii

DAFTAR GAMBAR x

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR LAMPIRAN xiii

ABSTRAKSI xiv

ABSTRACT xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Perumusan Masalah 7
1.3. Tujuan Penelitian 7
1.4. Manfaat penelitian..... 8
1.5. Metodologi Penelitian 9
1.5.1. Ruang lingkup penelitian..... 9
1.5.2. Rancangan penelitian..... 9
1.5.3. Objek Penelitian 9
1.5.4. Populasi, sampel penelitian dan teknik pengambilan sampel 9
1.5.5. Sumber Data 11
1.5.6. Metode Pengumpulan Data 11
1.5.7. Teknik Pengolahan Data 12
1.5.8. Metode Analisis Data 13
1.6. Sistematika penulisan..... 15

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO DAFTAR: 100948
TANGGAL : 01 JUN 2010

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori 16
2.1.1 Pengertian pajak..... 17
2.1.1.1. Cara pemungutan pajak..... 18
2.1.1.2.1. Stelsel pajak..... 18
2.1.1.2.2. Sistem pemungutan pajak..... 19
2.1.2 Nomor pokok wajib pajak..... 20
2.1.2.1. Cara memperoleh NPWP..... 23
2.1.2.2. Manfaat memiliki NPWP..... 26
2.1.2.3. Cara karyawan memperoleh NPWP..... 27
2.1.2.4. NPWP dan pemilik usaha..... 32
2.1.2.5. Tata cara pendaftaran dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak bagi anggota keluarga..... 36
2.1.2.6. Kegiatan atau keadaan yang mensyaratkan kepemilikan NPWP..... 37
2.1.2.7. WP non efektif..... 42
2.1.3 Pajak Penghasilan..... 44
2.1.3.1 Kewajiban pajak subjektif..... 45
2.1.3.2 Objek pajak..... 47
2.1.4 Pelayanan prima..... 55

BAB III DATA PENELITIAN

3.1. Gambaran Umum Perusahaan 61
3.1.1. KPP Pratama Palembang Ilir Timur..... 61
3.1.1.1. Latar Belakang KPP Pratama Palembang Ilir Timur..... 61
3.1.1.2. Tujuan, visi, dan misi..... 64
3.1.1.3. Uraian tugas dan kegiatan..... 64
3.1.1.4. Struktur Organisasi..... 95
3.1.2. KPP Pratama Palembang Ilir Barat..... 96
3.1.2.1. Latar Belakang KPP Pratama Palembang Ilir Barat..... 96
3.1.2.2. Uraian tugas dan kegiatan..... 100
3.1.2.3. Tujuan, visi, dan misi..... 108
3.1.2.4. Struktur organisasi..... 110
3.1.3. KPP Pratama Palembang Seberang Ulu..... 111
3.1.3.1. Latar belakang KPP Pratama Palembang Seberang Ulu..... 111

3.1.3.2. Tujuan, visi, dan misi 114
3.1.3.3. Uraian tugas dan kegiatan 115
3.1.3.4. Struktur organisasi 120
3.2. Data penelitian 121

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengaruh pertambahan jumlah NPWP terhadap penerimaan pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Palembang (KPP) di Kota Palembang 132
4.2. Analisa pengaruh pertambahan jumlah NPWP terhadap Persentase penerimaan pajak orang pribadi (PPh OP) terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Palembang (KPP) di Kota Palembang 146
4.3. Analisa motivasi wajib pajak orang pribadi dalam memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 150

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan 164
5.2. Saran 166

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur 95

Gambar 3.2. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat 110

Gambar 3.3. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat 120

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 3.1.	Jumlah Nomor Pokok Wajib Pajib (NPWP)	121
Tabel 3.2.	Penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh dengan menggunakan formulir 1770	122
Tabel 3.3.	Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP)	123
Tabel 3.4.	Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan	125
Tabel 3.5.	Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan per KLU (Kode Lapangan Usaha)	127
Tabel 3.6.	Jumlah Penerimaan SPT per KLU (Kode Lapangan Usaha) ...	128
Tabel 3.6a.	Daftar Penerimaan per KLU (Kode Lapangan Usaha) tahun 2009	129
Tabel 3.6b.	Daftar Penerimaan per KLU (Kode Lapangan Usaha) tahun 2008	129
Tabel 3.6c.	Daftar Penerimaan per KLU (Kode Lapangan Usaha) tahun 2007	130
Tabel 3.6d.	Daftar Penerimaan per KLU (Kode Lapangan Usaha) tahun 2006	130
Tabel 3.6e.	Daftar Penerimaan per KLU (Kode Lapangan Usaha) tahun 2005	131
Tabel 4.1.	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Perubahannya dari Tahun 2005 s/d 2009 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Timur	132
Tabel 4.2.	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Perubahannya dari Tahun 2005 s/d 2009 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Barat	133
Tabel 4.3.	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Perubahannya dari Tahun 2005 s/d 2009 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Seberang Ulu	134

Tabel 4.4. Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) dan Perubahannya dari tahun 2005 s/d 2009 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Timur 134
Tabel 4.5. Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) dan Perubahannya dari tahun 2005 s/d 2009 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Barat 135
Tabel 4.6. Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) dan Perubahannya dari tahun 2005 s/d 2009 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama PalembangSeberang Ulu 136
Tabel 4.7. Jumlah penerimaan PPh OP, penerimaan pajak dan persentase penerimaan PPh OP terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Timur 146
Tabel 4.8. Jumlah penerimaan PPh OP, penerimaan pajak dan persentase penerimaan PPh OP terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Barat 148
Tabel 4.9. Jumlah penerimaan PPh OP, penerimaan pajak dan persentase penerimaan PPh OP terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Seberang Ulu 149
Tabel 4.10. Penerimaan SPT 1770-Usaha bebas 151
Tabel 4.11. Jumlah Penerimaan SPT per KLU (Kode Lapangan Usaha) 152
Tabel 4.12. Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan per KLU 153
Tabel 4.13. Jawaban tentang sumber informasi NPWP 154
Tabel 4.14. Jawaban tentang waktu memiliki NPWP 154
Tabel 4.15. Jawaban tentang saat melaksanakan hak dan kewajiban Perpajakan 156
Tabel 4.16. Jawaban tentang manfaat memiliki NPWP 158
Tabel 4.17. Jawaban tentang Undang-Undang yang mengatur kepemilikan NPWP 159
Tabel 4.18. Jawaban tentang pelayanan yang diberikan KPP Pratama Ilir Timur 161

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 4.1. Hasil Pengolahan Data dengan Aplikasi SPSS di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Timur
Lampiran 4.2. Hasil Pengolahan Data dengan Aplikasi SPSS di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Barat
Lampiran 4.3. Hasil Pengolahan Data dengan Aplikasi SPSS di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Seberang Ulu
Lampiran 4.4. Hasil Pengolahan Data Kuisioner

ABSTRAKSI

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mengetahui dampak dari pertambahan jumlah NPWP terhadap penerimaan pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kota Palembang (2) Mengetahui pengaruh pertambahan jumlah NPWP terhadap persentase penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP) terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kota Palembang (3) Mengetahui motivasi yang melatarbelakangi wajib pajak orang pribadi dalam memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa selama tahun 2005-2009, adanya pertambahan jumlah NPWP di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Timur mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP) dengan nilai korelasi sebesar 0,919, yang berarti mempunyai hubungan yang erat. Sedangkan di dua Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yaitu di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Barat dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Seberang Ulu, pertambahan jumlah NPWP tidak mempunyai pengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, yaitu dengan nilai korelasi sebesar 0,149 dan 0,162. Adanya pertambahan jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi menambah jumlah proporsi sumbangannya terhadap penerimaan pajak penghasilan. hal ini terjadi di 2 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang diteliti. Dan mengenai motivasi wajib pajak orang pribadi dalam memiliki NPWP ditemukan bahwa wajib pajak dalam memiliki NPWP sebagian besar masih dikarenakan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang kepemilikan NPWP.

Untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak maka diharapkan baik pemerintah maupun Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan juga memberikan pelayanan terbaik agar wajib pajak semakin percaya dan nyaman dalam melakukan aktivitas perpajakannya.

Keywords: Nomor Pokok Wajib Pajak, Penerimaan Pajak Penghasilan, Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

ABSTRACT

The objectives of this research are (1) Knowing the impact of the amount of Tax Payer Registration Number to individual income tax revenue in the Tax Office (KPP) in Palembang (2) Determine the influence of the amount of Tax Payer Registration Number to a percentage of individual income tax revenues on income tax revenue in Tax Office (KPP) in Palembang (3) Identifying the underlying motivation of individual taxpayers in a Tax Payer Registration Number.

Research finding has shown that during period of years 2005-2009, the number of Tax Payer Registration Number in Tax Office (KPP) Pratama Ilir Timur Palembang apparently has an influence on individual income tax revenues (individual income tax) with a value of correlation 0.919, which means it has a close relationship. While the two Tax Office (KPP), which is in the Tax Office (KPP) Pratama Ilir Barat Palembang and the Tax Office (KPP) Pratama Seberang Ulu Palembang, the number of Tax Payer Registration Number has no effect on the amount of individual income tax revenues, with a value of correlation 0.149 and 0.162. The accretion of total individual income tax receipts increase the amount of contributions to the proportion of income tax revenue. This happened in 2 Tax Office (KPP) is being investigated. And about the motivation of an individual taxpayer in a Tax Payer Registration Number found that taxpayers in a Tax Payer Registration Number is still largely due to an Act to regulate the ownership of Tax Payer Registration Number.

To increase the amount of tax revenue it is expected that both the government and the Tax Office (KPP) can perform tasks with the best and also provide the best services so that taxpayers more confidence and comfortable in performing activities of taxation.

Keywords: Tax Payer Registration Number, income tax revenue, individual income tax revenue.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN BAB I

NAMA	:	VIVI OCTAVIA
NIM	:	01061003059
JURUSAN	:	AKUNTANSI
MATA KULIAH	:	PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI	:	**ANALISA PENGARUH PERTAMBAHAN JUMLAH NPWP TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) DI KOTA PALEMBANG**

PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI :

TANGGAL PERSETUJUAN		DOSEN PEMBIMBING
Tanggal 24 Februari 2010	Ketua :	Ahmad Subeki, SE., M.M.,Ak NIP. 196508161995121001
Tanggal 23 Februari 2010	Anggota :	Luk Luk Fuadah, SE., M.B.A., Ak NIP. 197405111999032001

Bab I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pendapatan negara merupakan suatu hal yang sangat penting guna membiayai pembangunan dan menjalankan roda pemerintahan. Pendapatan negara mempunyai berbagai macam sumber, baik dari sektor migas maupun nonmigas. Penerimaan dari sektor migas sangat besar, tetapi sektor migas tidak dapat kita andalkan sebagai sumber utama penerimaan negara terus-menerus karena persediaan sumber daya migas dari waktu ke waktu semakin menipis. Oleh karena itu, pemerintah berusaha mengoptimalkan penerimaan dari sektor nonmigas. Salah satunya adalah melalui sektor pajak. Sektor pajak dapat dikatakan sebagai sumber penerimaan dimasa sekarang dan di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan selain karena jumlahnya yang relatif stabil, juga mencerminkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam membiayai pembangunan.

Sejak tahun 1984, pemerintah terus melakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Hal itu dimulai dengan reformasi pajak (*tax reform*) terhadap Undang-Undang pajak sampai dengan berbagai jenis insentif pajak lainnya. Reformasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar di segala aspek perpajakan. Reformasi pajak ini ditandai dengan dikeluarkannya beberapa Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), dan Undang-Undang No.8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM). Perubahan yang mendasar atas Undang-Undang tersebut adalah sistem

pemungutan pajaknya, yaitu dari sistem *Official Assesment* yang memberikan kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang menjadi sistem *Self Assesment* yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Perubahan sistem ini dilakukan untuk mengurangi kontak antara pegawai pajak dan wajib pajak untuk mengurangi kolusi (Suparman, 2007). Selain itu, pemerintah bermaksud meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Setelah reformasi pajak tahun 1983, diadakan lagi reformasi tahun 1994 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 9 tahun 1984 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang No 10 tahun 1994 tentang PPh, Undang-Undang No 11 tahun 1994 tentang PPN dan PPnBM, dan Undang-Undang No 12 tahun 1994 tentang PBB. Tahun 2000 dilakukan lagi reformasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang No 17 tahun 2000 tentang PPh, Undang-Undang No 18 tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM, Undang-Undang No 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan Undang-Undang No 20 tahun 2000 tentang Bea Perolehan Tanah atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dengan terjadinya krisis yang melanda Indonesia, maka pemerintah memerlukan dana untuk melakukan pemulihan ekonomi akibat krisis yang terjadi. Sumber dana pemerintah telah mulai bergeser dari yang semula bertumpu pada sektor migas menjadi sektor nonmigas, yakni pajak. Dengan adanya perubahan tersebut maka pemerintah mulai melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan sektor pajak tersebut agar dapat meningkatkan penerimaan negara.

Peranan pajak dalam meningkatkan penerimaan negara semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat di dalam APBN-APBN tahun sebelumnya. Menurut informasi yang tercantum dalam Data Pokok APBN-P 2007 dan APBN 2008 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, tercatat dalam APBN 2006, penerimaan negara dari pajak berjumlah Rp 409.203 (dalam miliar rupiah) atau sebesar 64,3%, pada tahun 2007 sebesar Rp 492.010,9 (dalam miliar rupiah) atau sebesar 71,28% dan pada tahun 2008 sebesar Rp 591.978,4 (dalam miliar rupiah) atau sebesar 76,0%. Melihat besarnya peranan pajak dalam penerimaan negara, maka perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap pelaporan pajak oleh masyarakat, baik orang pribadi maupun badan agar tidak terjadi penyelewengan pajak oleh masyarakat.

Reformasi di bidang perpajakan yang dilakukan pemerintah masih terus dilanjutkan. Reformasi perpajakan jilid pertama dimulai dengan dibentuknya Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar pada tahun 2002. Pembentukan kantor pajak ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari tiga pilar reformasi perpajakan, yaitu reformasi bidang administrasi perpajakan, reformasi di bidang peraturan perpajakan, dan reformasi pengawasan perpajakan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak serta memperluas basis pajak, tanpa menggangu sektor usaha. (Abimanyu, n.d). Reformasi perpajakan ini telah berhasil mengubah persepsi (image) masyarakat terhadap institusi Dirjen Pajak dan keberhasilan pencapaian target penerimaan pajak (Chandra, 2010).

Sasaran lain dari adanya reformasi pajak adalah kenaikan *tax ratio* atau rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB). Selama reformasi perpajakan jilid I yang dimulai 2002, tax ratio Indonesia berkisar 13-14% (Investor Daily Indonesia, 2010). Menurut ekonom InterCafe IPB Iman

Sugema, sulit untuk meningkatkan *tax ratio* kalau kita masih bergantung pada *indirect tax*. Menurutnya pemerintah harus mengoptimalkan penerimaan pajak langsung (*direct tax)* yaitu pajak penghasilan (Koran Jakarta, 2009).

Pajak penghasilan adalah pajak subjektif di mana jenis pajak ini bisa dikenakan apabila syarat subjektif dan objektif terpenuhi bagi orang pribadi ataupun badan. Penerimaan pajak penghasilan merupakan penerimaan yang paling besar dibandingkan dengan penerimaan pajak lainnya. Hal ini terlihat dalam Data Pokok APBN-P 2007 dan APBN 2008 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, bahwa dari total penerimaan pajak tahun 2007, penerimaan pajak penghasilan sebesar Rp 251.748,3 (dalam miliar rupiah) dari penerimaan pajak Rp 492.010,9 (dalam miliar rupiah) atau sebesar 51,1% dan pada tahun 2008 penerimaan pajak penghasilan sebesar Rp305.961,4 dari keseluruhan penerimaan pajak sebesar Rp 591.978,4 (dalam miliar rupiah) atau sebesar 51,6%.

Melihat pajak penghasilan merupakan sumber penerimaan yang penting bagi negara, maka pemerintah memberi perhatian khusus terhadap pajak ini. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan pajak penghasilan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan cara meningkatkan jumlah kepemilikian NPWP. Adanya kebijakan pemerintah seperti misalnya saat adanya *sunset policy*, seperti diakui oleh Darmin Nasution yang merupakan Direktur Jenderal pajak (Dirjen Pajak) pada masa itu, sampai dengan Februari 2009 jumlah pertambahan NPWP baru mencapai 5,635 juta. Hal ini dipicu adanya *sunset policy* yang merupakan program pemerintah yang memberikan pengampunan terhadap denda pajak atas kesalahan atau kealpaan yang telah dilakukan oleh wajib pajak sebelumnya, ataupun juga bagi wajib pajak yang belum

memiliki NPWP tetapi telah memenuhi syarat objektif dan subjektif dapat memanfaatkan sunset policy tersebut untuk memperoleh NPWP (Indra, 2009).

Selain adanya program *sunset policy* yang telah banyak memberikan pengaruh terhadap jumlah NPWP baru, ada juga cara lain yang dilakukan untuk menjaring wajib pajak baru. Hal tersebut tercantum di dalam Undang-Undang pajak penghasilan No 36 tahun 2008 yang baru berlaku 1 Januari 2009 ini. Di dalam Undang-Undang tersebut tercantum :

1. Di dalam pasal 21, dikatakan bahwa besarnya tarif pajak yang dikenakan terhadap penghasilan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lebih tinggi 20 % dari tarif yang dikenakan terhadap wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
2. Di dalam Pasal 22, dikatakan bahwa pajak yang dikenakan atas pembelian barang mewah, bagi yang tidak memiliki NPWP, akan dikenakan denda 100% lebih besar dari tarif pajak normal.
3. Dalam Pasal 23, dicantumkan bahwa besarnya tarif pemotongan pajak lebih tinggi 100% bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP.
4. Dalam Pasal 25 ayat (8), dicantumkan bahwa bila wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki NPWP dan telah berusia 21 tahun yang bertolak keluar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain itu, dengan dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Nomor 02/3/2009, yang berisi bahwa PNS tidak dikecualikan harus menjalankan kewajiban perpajakan yaitu mempunyai NPWP dan melaporkan SPT pajak penghasilan (PPh). Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No SE-49/PJ/2008 tentang pelaksanaan peraturan direktur jenderal pajak No 35/PJ/2008 tentang kewajiban

pemilikan nomor pokok wajib pajak dalam rangka pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan, tercantum bahwa batasan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) yang dikecualikan dari kewajiban pencantuman NPWP dalam Surat Setoran BPHTB (SSB) oleh Wajib Pajak Orang pribadi adalah sebesar kurang dari Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Semakin gencarnya pemerintah melakukan usaha-usaha untuk menjaring wajib pajak baru maka berpotensi menambah penerimaan pajak negara. Akan tetapi pertambahan jumlah NPWP ini juga berpotensi tidak diiringi dengan pertambahan jumlah penerimaan negara. Oleh karena itu, hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengambil judul **"Analisa Pengaruh Pertambahan Jumlah NPWP terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kota Palembang"**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1) Apakah pertambahan jumlah NPWP mempengaruhi jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kota Palembang?
2) Bagaimanakah pengaruh pertambahan jumlah NPWP terhadap persentase penerimaan pajak penghasilan orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kota Palembang?
3) Apa motivasi wajib pajak orang pribadi dalam memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1) Mengetahui dampak dari pertambahan jumlah NPWP terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kota Palembang.
2) Mengetahui pengaruh pertambahan jumlah NPWP terhadap persentase penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP) terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kota Palembang.
3) Mengetahui motivasi yang melatarbelakangi wajib pajak orang pribadi dalam memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Kantor Pajak

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi kantor pajak mengenai pengaruh dari pertambahan jumlah NPWP terhadap penerimaan pajak orang pribadi. Dan juga memberikan informasi tentang pengaruh pertambahan jumlah NPWP terhadap persentase penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP) terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh). Selain itu diharapkan dapat memberikan informasi mengenai motivasi yang melatarbelakangi wajib pajak untuk memiliki NPWP.

2. Bagi Akademisi

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian tentang pertambahan NPWP terhadap penerimaan pajak, informasi tentang pengaruh pertambahan jumlah NPWP

terhadap persentase penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP) terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) dan juga motivasi yang melatarbelakangi wajib pajak orang pribadi dalam memiliki NPWP.

3. Bagi Penulis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai pertambahan NPWP terhadap penerimaan pajak, informasi tentang pengaruh pertambahan jumlah NPWP terhadap persentase penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP) terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) serta motivasi yang melatarbelakangi wajib pajak orang pribadi dalam memiliki NPWP

1.5. Metodologi penelitian

1.5.1. Ruang lingkup penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis pertambahan jumlah NPWP terhadap penerimaan pajak selama 5 tahun yaitu dari tahun 2005 sampai dengan 2009. Lokasi penelitian dilakukan di 3 KPP Kota Palembang, yaitu KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, KPP Pratama Palembang Ilir Timur, dan KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

1.5.2. Rancangan penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif (*descriptive research*). Menurut Indriantoro dan Supomo (2002:26), penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan.

1.5.3. Objek penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di Kantor-kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Palembang, yaitu KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, KPP Pratama Palembang Ilir Timur, dan KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

1.5.4. Populasi, sampel penelitian dan teknik pengambilan sampel

1. Populasi

Populasi adalah kumpulan dari individu yang kualitas dan ciri–cirinya telah ditetapkan terlebih dahulu. Populasi dibatasi sebagai jumlah individu yang paling sedikit memiliki sifat yang sama (Hadi, 2000). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang telah memiliki NPWP (tahun 2005-2009) dan merupakan wajib pajak yang melakukan usaha bebas (wajib pajak yang melaporkan pajak dengan formulir 1770). Dari jumlah wajib pajak ini, populasi yang diambil ditentukan dengan syarat yang memberikan jumlah penerimaan terbesar terhadap KPP dan juga yang menyampaikan SPT secara berkala setiap tahunnya. Setelah dilakukan perhitungan, maka jumlah wajib pajak yang memenuhi kriteria berjumlah 589 (terdiri dari 417 yang merupakan pedagang besar berdasarkan balas jasa (FEE) atau kontrak dan 172 yang merupakan pedagang besar lainnya)

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dikenai langsung oleh suatu penelitian (Hadi, 2000). Dari jumlah populasi, diambil sampel yaitu sebesar 25%, yaitu sebesar 147.

3. Teknik pengambilan sampel

Teknik pengambilan sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah pemilihan sampel bertujuan *(purposive sampling)*. Menurut Indriantoro dan Supomo (2002:131) teknik ini disebut juga *Judgment Sampling*, yang merupakan tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu.

1.5.5. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

a. Data primer *(primary data)*

Data primer yang digunakan adalah data-data yang diperoleh dari objek penelitian, yaitu mencakup gambaran umum KPP, jumlah NPWP dari tahun 2005-2009, jumlah penerimaan pajak penghasilan dari tahun 2005-2009.

b. Data Sekunder (*secondary data*)

Data sekunder yang digunakan terkait dengan buku-buku serta jurnal dan artikel yang berkaitan dengan NPWP dan pajak penghasilan.

1.5.6. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang dilakukan ada 2 yaitu :

1. Penelitian kepustakaan (*Library research*)

Metode ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berguna sebagai landasan teori untuk mendukung data primer yang diperoleh dalam penelitian. Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku dan literatur seperti majalah

akuntansi, jurnal-jurnal ataupun yang diperoleh dari internet yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi penulis.

2. Penelitian lapangan (*Field research*)

Dengan metode penelitian lapangan ini, penulis melakukan survei langsung ke tempat yang menjadi objek penelitian untuk memperoleh data primer.

Data primer ini diperoleh dengan cara :

a. Dokumentasi (*documentation*)

Metode ini dilakukan menyelidiki sumber-sumber dokumen perusahaan yang relevan dengan topik dalam penelitian ini.

b. Kuesioner

Hal ini dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan yang akan dijawab oleh wajib pajak yang telah memiliki NPWP sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam pengambilan sampel. Lalu setelah mengumpulkan kembali kuisioner yang telah diisi oleh wajib pajak, dapat diambil kesimpulan dari jawaban atas pertanyaan tersebut.

1.5.7. Teknik pengolahan data

Dalam setiap penelitian, peneliti harus berusaha mengumpulkan data yang dapat dipercaya. Karena informasi yang dihasilkan tergantung dari kebenaran data yang dikumpulkan.

Dalam penelitian ini, setelah kuisioner dikembalikan, maka tahapan yang dilakukan adalah :

1) Pengeditan (*Editing*)

Proses *editing* merupakan proses pengecekan dan penyesuaian yang diperlukan terhadap jawaban kuisioner yang diberikan pada

responden dari kemungkinan kekeliruan dalam proses pencatatan yang dilakukan saat mengumpulkan data, pengisian kuisioner yang tidak lengkap dan tidak konsisten. Tujuan pengeditan data adalah untuk menjamin kelengkapan, konsistensi, dan kesiapan data penelitian dalam proses analisis.

2) Pemberian kode (*Coding)*

Proses ini merupakan proses identifikasi dan klasifikasi data penelitian ke dalam skor numerik atau karakter simbol. Proses pemberian kode akan memudahkan dan meningkatkan efisiensi proses *data entry* ke komputer.

3) Pemrosesan data (*Data processing)*

Pemrosesan data dilakukan melalui tabulasi dengan bantuan komputer dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel 2007(Indriantoro, 2002).

1.5.8. Metode analisis data

Penulis akan menggunakan dua metode untuk melakukan teknik analisis, yaitu sebagai berikut:

1. Analisis kualitatif

Data kualitatif yang digunakan berupa catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topik permasalahan. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode deskriptif dengan mengkaji sumber primer dan sekunder.

2. Analisis kuantitatif

Analisis kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan

analisis data dengan prosedur statistik. Data-data yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan rumus :

a. Koefisien regresi sederhana

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen (x) dengan variabel dependen (y).

y = a + bx

$$b = \frac{\sum xy - n.\overline{x}\,\overline{y}}{\sum x^2 - n\overline{x}^2} \qquad a = \overline{y} - b\,\overline{x}$$

Keterangan :

y = penerimaan pajak

a = konstanta

x = jumlah wajib pajak

b = koefisien regresi

n = jumlah tahun

b. Koefisien korelasi

Koefisien ini berusaha mencari seberapa besar pengaruh hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Analisis ini akan digunakan untuk menguji apakah akan ada pengaruh antara pertambahan jumlah NPWP dengan penerimaan pajak. Rumus korelasi yang akan digunakan adalah :

$$R_{xy} = \frac{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n\sum X^2 - (\sum X)^2\}\{n\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan :

y = penerimaan pajak

x = jumlah wajib pajak

n = jumlah tahun

r = koefisien korelasi

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang direncanakan terdiri dari enam bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian yang mencakup ruang lingkup penelitian, rancangan penelitian, objek penelitian, populasi, sampel penelitian dan teknik pengambilan sampel, sumber data, dan metode pengumpulan data, teknik pengolahan data serta metode analisis data dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi landasan teori yang memuat uraian mengenai definisi dari pajak, pengertian nomor pokok wajib pajak, cara memperoleh NPWP dan manfaat memiliki NPWP, cara karyawan memperoleh NPWP dan manfaatnya, NPWP dan pemilik usaha, serta wajib pajak nonefektif, pengertian pajak penghasilan, objek dan bukan objek pajak penghasilan, serta pelayanan prima.

Bab III Data Penelitian

Bab ini berisi mengenai gambaran umum objek penelitian atau deskripsi umum objek penelitian yang meliputi sejarah perusahaan; misi dan visi perusahaan; struktur organisasi dan uraian pembagian tugas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kota Palembang, serta data-data penelitian yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Bab IV Pembahasan

Bab ini berisi analisa yang memusatkan pada jumlah NPWP dan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kota Palembang. Hal ini akan dilakukan dengan melakukan analisa dari pertambahan jumlah NPWP terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Kota Palembang. Analisa juga akan dilakukan untuk pengaruh pertambahan jumlah NPWP terhadap persentase penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP) terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) di KPP Kota Palembang. Selain itu juga akan diambil kesimpulan dari kuisioner yang diberikan kepada wajib pajak untuk mengetahui alasan mengapa wajib pajak membuat NPWP.

Bab V Kesimpulan dan saran

Bab ini berisi kesimpulan atas pembahasan atau hasil analisis yang dilakukan sebelumnya dan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kota Palembang.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN BAB II

NAMA	:	VIVI OCTAVIA
NIM	:	01061003059
JURUSAN	:	AKUNTANSI
MATA KULIAH	:	PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI	:	**ANALISA PENGARUH PERTAMBAHAN JUMLAH NPWP TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) DI KOTA PALEMBANG**

PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI :

TANGGAL PERSETUJUAN		DOSEN PEMBIMBING
Tanggal 3 April 2010	Ketua :	Ahmad Subeki, SE., M.M.,Ak NIP. 196508161995121001
Tanggal 5 Maret 2010	Anggota :	Luk Luk Fuadah, SE., M.B.A., Ak NIP. 197405111999032001

Daftar Pustaka

Abimanyu, Anggito. n.d. Reformasi Perpajakan Perlu Dukungan Masyarakat. Diambil pada tanggal 31 Januari 2010 dari www.fiskal.depkeu.go.id/referensi/**ReformasiPerpajakan**.doc

Anonim. Teknik Sampling. Diambil pada tanggal 4 Februari 2010 dari http://beingsmartinafunway.blogspot.com/2009/11/teknik-sampling.html

Ardhana. 2008. Penelitian Deskriptif. Diambil pada tanggal 2 Februari 2010 dari http://ardhana12.wordpress.com/2008/02/27/penelitian-deskriptif/

Chandra, Budi. 2010. Membedah Reformasi Pajak Perlu peningkatan Mutu Dan Militansi Pegawai. Diambil pada tanggal 31 januari 2010 dari http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=9618:membedah-reformasi-pajak-perlu-peningkatan-mutu-dan-militansi-pegawai&catid=87:Berita%20Perpajakan&Itemid=123

Departemen Keuangan Republik Indonesia. Data Pokok APBN-P 2007 dan APBN 2008. Diambil pada tanggal 28 Desember 2009 dari http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/07-11-08,%20DataPokokAPBN20072008.pdf

Hadi, Sutrisno. 2000. *Metodologi Research jilid2*. Yogyakarta: Andi

Ikatan Akuntan Indonesia.2008. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu*. Cetakan kelima belas. Jakarta:BPFE

Ikatan Akuntan Indonesia.2007. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta:Salemba Empat

Indra. 2009. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Menurun. Diambil pada tanggal 28 Desember 2009 dari http://els.bappenas.go.id/upload/kliping/Pertumbuhan%20penerimaan%20pajak.pdf

Indriantoro, Nur & Bambang Supeno. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk akuntansi dan manajemen edisi pertama*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta

Investor Daily Indonesia. 2010. Reformasi Pajak Incar 23 Juta NPWP. Diambil pada tanggal 31 Januari 2010 dari http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=9737:reformasi-pajak-incar-23-juta-npwp&catid=87:Berita%20Perpajakan&Itemid=123

Jps. PNS Juga Wajib Punya NPWP. Diambil pada tanggal 1 Desember 2009 dari http://www.surya.co.id/2009/05/06/pns-juga-wajib-punya-npwp.html

Koran Jakarta. 2009. Reformasi Pajak Belum Berdampak Bagi Penerimaan. Diambil pada tanggal 31 Januari 2010 dari http://ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=7726&q=&hlm=1

Muyassaroh, Etty. 2010. Setiap Pemilik NPWP Pribadi Harus Baca Buku Ini. Cetakan pertama. Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Prastowo, Yustinus. 2009. *Manfaat dan resiko memiliki NPWP*. Jakarta : Raih Asa Sukses

Pemerintah Republik Indonesia, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No SE-45/PJ/2007 tentang pelayanan prima. Diambil pada tanggal 16 Januari 2010 dari http://klikpajak.com/peraturan/surat-edaran-dirjen-pajak-no-se-45pj2007

Pemerintah Republik Indonesia, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No SE-49/PJ/2008 tentang pelaksanaan peraturan direktur jenderal pajak No 35/PJ/2008 tentang kewajiban pemilikan nomor pokok wajib pajak dalam rangka pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan. Diambil pada tanggal 16 Januari 2010 dari http://solusiakuntansi.com/j/index.php/KUP/Nomor-Pokok-Wajib-Pajak/SE-49/PJ/2008-PELAKSANAAN-PERATURAN-DIREKTUR-JENDERAL-PAJAK-NOMOR-35/PJ/2008-TENTANG-KEWAJIBAN-PEMI.html

Pemerintah Republik Indonesia, Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE 89/PJ/2009 tentang Tatacara Penanganan WP Nonefektif. Diambil pada tanggal 27 Oktober 2009 dari http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&hlm=10&page=show&id=13928

Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Diambil pada tanggal 8 Oktober 2009 dari http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/uang/UU36-2008.pdf

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER - 16/PJ/2007 tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegwai melalui pemberi kerja/bendaharawan pemerintah

Pemerintah Republik Indonesia, Surat Edaran SE-13/PJ./2007 tentang Penjelasan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-175/PJ./2007 tentang Tata Cata Pemutakhiran Data Objek Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan/atau Memiliki Tempat Usaha di Pusat Perdagangan dan/atau Pertokoan

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-116/PJ./2007 tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi melalui pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Pemerintah Republik Indonesia, Pengumuman Nomor PENG-01/PJ/2008 tentang Fasilitas Penghapusan Sanksi Pajak (*Sunset Policy* 2008)

Pemerintah Republik Indonesia, Keputusan DirJen Pajak Nomor KEP-159/PJ/2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang penerapan organisasi dan tata kerja KPP Pratama dan/atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)

Suandy, Erly. 2005. Perpajakan Pendekatan Komprehensif. Jakarta: Salemba Empat

Suparman, Raden. 2007. Reformasi Perpajakan II. Diambil pada tanggal 31 Januari 2010 dari http://pajaktaxes.blogspot.com/2007/04/reformasi-perpajakan-ii.html

Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat